

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/25770> holds various files of this Leiden University dissertation.

**Author:** Van Thuy, Pham

**Title:** Beyond political skin : convergent paths to an independent national economy in Indonesia and Vietnam

**Issue Date:** 2014-05-14

## RINGKASAN

Studi ini membahas transformasi sebuah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional di Indonesia dan Vietnam. Ia terfokus pada dua proses: dekolonisasi dan rekonstruksi ekonomi yang saling terkait satu sama lain di kedua negara tersebut sesudah Perang Dunia Kedua, dengan memberikan perhatian khusus pada faktor-faktor politik dan institusional yang terlibat dalam proses-proses tersebut. Kajian ini menunjukkan bahwa, meskipun berbagai perbedaan situasi politik yang menyebabkan perbedaan strategi yang diambil, para pemimpin Vietnam dan Indonesia pada dasarnya berusaha mencapai tujuan jangka panjang yang sama, yaitu: tercapainya nasionalisme ekonomi. Keinginan Indonesia untuk menyingkirkan warisan ekonomi kolonialisme Belanda dan menempatkan seluruh perekonomian di bawah kontrol dan kepemilikan negara yang kuat, sesuai dengan semangat Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin pada akhir 1950an hingga awal 1960an, menyerupai transformasi sosialis di Vietnam Utara pada tahun 1950an dan konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan pemerintah di Vietnam Selatan pada akhir 1950an dan awal 1960an.

Pertama-tama, studi ini berkonsentrasi pada perbedaan-perbedaan besar dalam kerangka politik dan institusional Indonesia dan Vietnam sesaat setelah keduanya memperoleh kemerdekaan. Para pemimpin Indonesia utamanya adalah kalangan nasionalis yang berafiliasi dengan berbagai partai politik. Banyak diantara mereka pernah bekerja di dalam lingkaran pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang sehingga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas di bidang pengelolaan ekonomi. Sebaliknya, mayoritas anggota pemerintahan Republik Demokratik Vietnam (Democratic Republic of Vietnam - DRV) adalah pemimpin-pemimpin revolusioner yang menganut ideologi komunis. Pada tahun

1951, Partai Komunis Vietnam mendeklarasikan secara resmi para pemimpin negerinya, sehingga kemudian mengakibatkan terjadinya sebuah ‘peleburan’ (*pertification*) negara. Penyusupan anggota-anggota partai ke dalam berbagai aparat negara terjadi dengan cepat di Vietnam Utara sesudah tahun 1954, dan pada tahun 1960, Partai ini berhasil menguasai sebagian besar posisi penting di dalam pemerintahan DRV. Kalangan nasionalis Vietnam juga memperoleh posisi-posisi penting di dalam pemerintahan DRV pada bulan-bulan awal sesudah kemerdekaan. Namun demikian, mereka segera tersingkirkan dan baru kemudian muncul kembali sebagai kekuatan politik di Vietnam Selatan setelah terjadinya pembagian negara sebagai akibat dari Persetujuan Jenewa (*Geneva Agreement*) tahun 1954.

Perbedaan-perbedaan latar belakang politik dan professional di dalam kepemimpinan Indonesia dan Vietnam berdampak besar pada proses dekolonisasi ekonomi di kedua negara. Menyadari kekhawatiran Belanda akan masa depan kepentingan-kepentingan ekonominya di Indonesia, para pemimpin Indonesia berupaya memperoleh pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia melalui konsesi-konsesi ekonomi. Perusahaan-perusahaan Belanda yang dirampas dari Jepang oleh pemerintah Indonesia selama bulan-bulan awal sesudah kemerdekaan dikembalikan kepada para pemiliknya semula secara bertahap. Kebijakan pragmatis Indonesia ini, tidak bisa dipungkiri dibantu oleh tekanan Amerika yang secara jitu berhasil memaksa pemerintah Belanda, yang dihasilkan melalui kesepakatan yang dicapai pada Konferensi Meja Bundar pada bulan November 1949. Setelah menunggu sekian lama, Indonesia akhirnya memperoleh Transfer Kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.

Faktanya, pemimpin-pemimpin Vietnam juga berusaha untuk mencegah perang melalui negosiasi diplomatik. Konsesi-konsesi ekonomi yang dibuat oleh Hò Chí Minh dengan Prancis dalam Modus Vivendi 14 September 1946 adalah mirip dengan apa yang dibuat pemimpin-pemimpin Indonesia dengan Belanda dalam Perjanjian Linggadjati pada tahun 1947 dan Perjanjian Finec pada tahun 1949, kecuali butir-butir ketentuan mengenai kewajiban hutang Indonesia. Agresi pejabat-pejabat Prancis di Vietnam, yang menginginkan untuk memutuskan

hubungan dengan pemerintah Vietnam yang dikuasai kalangan Komunis, mementahkan upaya-upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan damai dengan Presiden Hồ Chí Minh dan pemimpin-pemimpin utama pemerintah Prancis di Paris. Ketika perang akhirnya meletus pada Desember 1946, kebijakan pemerintah DRV berkenaan dengan bisnis-bisnis Prancis mengalami perubahan radikal. Selain melancarkan operasi militer, Việt Minh juga mengorganisir berbagai kampanye sabotase dengan target utama menghancurkan instalasi-instalasi ekonomis milik Prancis.

Perusahaan-perusahaan Prancis di Vietnam mengalami kerusakan parah selama kampanye sabotase ekonomi yang dilancarkan oleh Việt Minh tersebut. Seiring perluasan wilayah yang dikontrol oleh Việt Minh pada awal 1950an, tambang-tambang dan pabrik-pabrik Prancis di Vietnam Utara secara bertahap jatuh ke tangan Viet Min dan instalasi-instalasi industri di kota-kota, seperti halnya perkebunan-perkebunan karet di Vietnam Selatan, juga terus mengalami serangan. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, perusahaan-perusahaan Prancis mulai mempertimbangkan pilihan untuk menghentikan operasinya dan menarik diri dari Vietnam. Penarikan bisnis Prancis dari Vietnam dimulai pada tahun 1948 dan menjadi kecenderungan umum pada awal 1950an. Korporasi perbankan dan perusahaan-perusahaan manufaktur secara bertahap mulai mentransfer bisnis mereka ke koloni-koloni Prancis lainnya atau ke Prancis. Perusahaan-perusahaan Prancis yang tersisa di Vietnam Utara berpindah ke Selatan sesudah ditandatanganinya Perjanjian Jenewa tahun 1954-1955. Evakuasi orang-orang Prancis ke wilayah selatan disertai oleh emigrasi orang-orang Cina dan orang-orang Vietnam penganut Katolik Romawi.

Posisi ekonomis Prancis dan Cina di Vietnam Selatan tergusur oleh kebijakan-kebijakan nasionalisme yang dikeluarkan oleh Diệm. Selama pelaksanaan reformasi tanah yang dimulai tahun 1956, perkebunan-perkebunan beras utama Prancis diambilalih kepemilikannya ke tangan orang Vietnam. Dengan menerapkan langkah-langkah administratif, pemerintahan Diệm memaksa perusahaan-perusahaan Prancis untuk menutup usahanya bagi orang Vietnam. Pengusaha Prancis diijinkan untuk memelihara kepemilikan mereka

atas perkebunan-perkebunan karet, karena meroketnya saham nilai komoditas karet dalam nilai pendapatan ekspor dan karena kurangnya dana untuk memberikan kompensasi kepada para pemilik Prancis tersebut. Pengambilalihan kepentingan ekonomi Cina dilakukan dengan cara memaksa semua orang Cina kelahiran Vietnam untuk mencabut kewarganegaraan Vietnam-nya. Selain itu, orang-orang berkebangsaan asing juga dilarang bekerja di sejumlah profesi, yang sudah dikuasai oleh orang-orang Cina sejak zaman kolonial. Pada saat rejim Diêm jatuh pada November 1963, hampir semua perusahaan yang diasosiasikan dengan kolonialisme Prancis telah berada di bawah penguasaan otoritas Vietnam.

Menariknya, pada saat perusahaan-perusahaan Prancis mulai berpindah ke luar Vietnam, Belanda justru tengah memperkuat posisi ekonominya di Indonesia. Instalasi-instalasi Belanda yang diduduki oleh orang Indonesia dikembalikan kepada para pemiliknya sesaat setelah dilakukannya Penyerahan Kedaulatan. Kecuali nasionalisasi bank sentral dan sejumlah fasilitas publik lain, tidak ada transfer kepemilikan yang signifikan dari Belanda ke Indonesia di awal tahun 1950an. Dominasi Belanda dalam perekonomian Indonesia mulai mengalami perubahan radikal pada bulan Desember 1957, ketika hampir seluruh perusahaan milik orang Belanda diambil alih oleh organisasi-organisasi Serikat Dagang Indonesia dan militer. Mereka semua dinasionalisasi secara resmi pada tahun 1959 oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan minyak BPM dan Unilever lolos dari nasionalisasi disebabkan oleh status nasionalitasnya yang ganda sebagai perusahaan Inggris-Belanda (*Anglo-Dutch*). Cina menjadi target berikutnya dari nasionalisme ekonomi Indonesia. Di akhir tahun 1950an, berbagai organisasi sosial, asosiasi dagang, sekolah, toko, bank, perusahaan perkebunan dan pertambangan milik orang Cina dilarang beroperasi atau berada di bawah kontrol pemerintah Indonesia. pada tahun 1960, orang Cina dan bangsa asing lainnya dicekal dari perdagangan di wilayah pedesaan. Sebagaimana etnik Cina di Vietnam Selatan, saudara-saudara mereka di Indonesia juga dipaksa untuk menjual bisnis mereka di pedesaan kepada penduduk setempat. Perusahaan-perusahaan besar, seperti Oei Tiong Ham Concern, jatuh di bawah penguasaan langsung pemerintah Indonesia.

Penyitaan perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika terjadi antara 1963 dan 1965 bersamaan dengan kebijakan konfrontatif Soekarno terhadap imperialis dan kekuatan-kekuatan kolonial, terutama Amerika Serikat dan Inggris, yang terlibat langsung dalam pembentukan Federasi Malaysia dan meluasnya perang di Vietnam. Perkebunan-perkebunan Inggris, perusahaan asuransi, perusahaan manufaktur, dan fasilitas-fasilitas Shell disita oleh serikat-serikat dagang di akhir 1963 hingga awal 1964. Pada Maret 1965, perusahaan-perusahaan Amerika, termasuk dua perusahaan minyak terkemuka, Stanvac dan Caltex, perusahaan-perusahaan manufaktur dan asuransi juga disita oleh serikat-serikat dagang. Pada April 1965, Presiden Soekarno memutuskan secara resmi bahwa semua perusahaan asing akan diletakan di bawah pengawasan pemerintah. Hingga penyerahan sebagian besar perusahaan Inggris dan Amerika di akhir tahun 1960an, untuk pertama kalinya Indonesia terbebas dari kontrol modal asing.

Aspek lain dari perjuangan ekonomi di Vietnam dan Indonesia berkenaan dengan pencarian bentuk baru perekonomian nasional yang dibangun untuk menggantikan ekonomi kolonial sebelumnya. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menekankan pentingnya kontrol negara terhadap ekonomi. Namun demikian, hambatan-hambatan finansial dan teknis yang dihadapi negeri ini yang muncul akibat meningkatnya ancaman militer Belanda, telah membuat sistem ekonomi yang diinginkan tersebut harus berhenti di tingkat impian semata. Indonesia harus mengadopsi kebijakan pragmatis di akhir tahun 1940an dan di awal tahun 1950an, yaitu dengan mengakui makna penting kontrol kekuasaan asing atas sebagian besar perekonomian demi menggapai kemerdekaan politik dan pembangunan ekonomi. Akibatnya, ciri-ciri utama dari perekonomian kolonial Belanda di Indonesia tetap bertahan kokoh selama periode sesaat sesudah kemerdekaan. Kontrol negara hanya bisa dicapai pada tingkat pengawasan, kerjasama dan dalam pembentukan sejumlah kecil perusahaan.

Sebaliknya, Undang-Undang DRV tahun 1945 memungkinkan terwujudnya sebuah sistem kontrol negara yang moderat. Pemerintah DRV memiliki kewenangan untuk melakukan sedikit intervensi dalam perekonomian

selama tahun-tahun awal sesudah kemerdekaan. Perubahan mulai menyentuh sistem ini pada tahun 1951 ketika Partai Komunis mengambil alih secara resmi proses pembuatan kebijakan di DRV. Prinsip-prinsip sebuah perekonomian sosialis secara perlahan mulai bekerja di Vietnam Utara. Antara Desember 1953 dan Juli 1956, Partai Komunis melaksanakan kebijakan reformasi tanah (*landreform*) radikal, yang menghapus sistem kepemilikan tanah yang berlaku sebelumnya di pedesaan Vietnam. Reformasi tanah tersebut segera diikuti oleh kampanye-kampanye kolektivisasi, yang menentukan bahwa tanah digabungkan ke dalam koperasi produksi pertanian. Hak kepemilikan tanah berada di tangan negara, yang juga mengambilalih hasil-hasil pertanian dari koperasi ini beserta distribusinya. Transformasi sosialis di bidang industri, kerajinan tangan dan perdagangan dimulai pada akhir tahun 1957. Bekas perusahaan-perusahaan Prancis digabungkan kedalam perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan swasta Vietnam dianjurkan untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk membentuk perusahaan bersama atau koperasi industrial. Pada tahun 1960, transformasi sosialis di Vietnam Utara sebagian besar telah berakhir dan Partai – negara telah mengambilalih kontrol atas semua alat-alat produksi dan distribusi yang penting. Reorganisasi ekonomis di Vietnam Selatan juga menghasilkan suatu konsentrasi kekuasaan ekonomis di tangan pemerintahan Diêm. Di bawah program reformasi tanah sebagian besar tanah yang disita menjadi milik negara. Pemerintah mendirikan perusahaan-perusahaan milik negara untuk meraih mayoritas saham atau bahkan meraih kontrol penuh atas semua perusahaan asing yang ada. Investasi asing yang baru hanya bisa diterima dalam bentuk usaha bersama, yang didalamnya pemerintah menguasai setidaknya 51 persen equitas.

Perubahan radikal dalam struktur perekonomian Indonesia terjadi pada akhir 1950an dan awal 1960an. Perubahan itu ditandai dengan Negara mengambil alih kontrol langsung dan manajemen perekonomian nasional melalui kebijakan Ekonomi Terpimpin. Seiring dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pada bulan Juli 1959, maka prinsip-prinsip ekonomi radikal pun turut diterapkan. Dengan pengecualian sejumlah kecil perkebunan dan toko milik swasta, perusahaan-perusahaan besar milik Belanda,

Cina, Inggris, dan Amerika direorganisasi dan digabungkan ke dalam perusahaan-perusahaan baru milik negara. Manajemen perusahaan-perusahaan tersebut dipercayakan kepada sejumlah agensi pemerintahan, yang dewan direktornya seringkali terdiri dari menteri-menteri kabinet, pejabat militer, dan perwakilan dari serikat dagang pimpinan Partai Komunis. Ini berbeda dengan situasi di Vietnam Utara, di mana kader-kader partai bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan-perusahaan dan koperasi-koperasi. Selain itu, sementara Vietnam Utara dan Selatan yang masing-masing menerima bantuan dari blok Sosialis dan negara-negara kapitalis, ekonomi Indonesia diarahkan menuju kemandirian. Soekarno berupaya membangun sejenis sosialisme Indonesia, "*Sosialisme ala Indonesia*". Meskipun memiliki perbedaan, Sosialisme Indonesia dan tetangganya di Vietnam Utara menunjukkan sejumlah persamaan dalam hal perencanaan administrasi ekonomi nasional yang terpusat atau sentralistik. Pada titik inilah, pada akhirnya Indonesia dan Vietnam mampu mencapai tujuan-tujuan nasionalisme ekonomi mereka. Semua prinsip dasar perekonomian kolonial yang berlaku sebelumnya mereka tinggalkan dan sebuah perekonomian nasional benar-benar dibangun di kedua negara. Walaupun harga untuk transformasi ekonomi ini sangat tinggi, pencapaian kemerdekaan dalam persoalan-persoalan ekonomis telah meletakkan fondasi yang kuat bagi perkembangan Indonesia dan Vietnam di periode-periode selanjutnya.